

**PARTISIPASI PETANI PADI PADA AKTIVITAS
KELEMBAGAAN PUPM DI DESA JIPANG KECAMATAN
BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA**

**MUHAMMAD JAMIL
105960171614**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR,
2019**

**PARTISIPASI PETANI PADI PADA AKTIVITAS KELEMBAGAAN
PUPM DI DESA JIPANG KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN
KABUPATEN GOWA**

**MUHAMMAD JAMIL
105960171614**



**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian
Strata Satu (S-1)**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Partisipasi Petani Padi Pada Aktivitas Kelembagaan PUPM
di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan
Kabupaten Gowa

Nama : Muhammad Jamil

Stambuk : 105960171614

Konsentrasi : Peyuluhan Pertanian

Program Studi : Agribisnis

Fakultas : Pertanian

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Amruddin, S.Pt., M.Si
NIDN : 0922076902


Sitti Khadijah Yahya Hiola, S.Tp., M.Si
NIDN : 0923098305

Diketahui

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Prodi Agribisnis

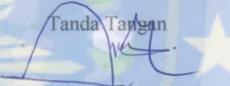
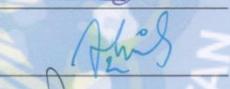

H. Farhanuddin, S.Pi., M.P.
NIDN : 0912066901


Dr. Sri Mardiyati, S.P., M.P.
NIDN : 0921037003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul : Partisipasi Petani Padi Pada Aktivitas Kelembagaan PUPM di
Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa
Nama : Muhammad Jamil
Stambuk : 105960171614
Konsentrasi : Peyuluhan pertanian
Program Studi : Agribisnis
Fakultas : Pertanian

KOMISI PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Amruddin, S.Pt. M.Si</u> Ketua Sidang	
2. <u>Sitti . Khadijah Yahya Hiola, S.TP.,MSi</u> Sekretaris	
3. <u>Dr. Ir. Muh Arifin Fattah, M.Si</u> Anggota	
4. <u>Sitti Arwati, S.P., M.Si</u> Anggota	

Tanggal Lulus : 17 Juni 2019

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Partisipasi Petani Padi Pada Aktivitas Kelembagaan PUPM Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa** adalah benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Makassar, April

2019

Muhammad Jamil
105960171614

ABSTRAK

MUHAMMAD JAMIL. 105960171614 partisipasi petani padi pada aktivitas kelembagaan PUPM di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Dibimbing oleh AMRUDDIN dan SITTI KHADIJAH YAHYA HIOLA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi petani padi pada aktivitas kelembagaan PUPM di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dengan titik kajian mengenai luas lahan, pekerjaan sampingan, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jumlah populasi sebanyak 252 kepala keluarga petani padi dan sampel sebanyak 10% atau 25 kepala keluarga petani padi, menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi petani padi pada aktivitas kelembagaan PUPM khususnya di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa tergolong tinggi, skor di kategorikan sedang berarti responden sering membeli alat-alat pertanian ,dan responden juga sering juga menambah alat-alat pertaniannya guna mengefisienkan pekerjaannya, petani padi juga sering menjual kelebihan hasil panennya kepada Lembaga Usaha Pangan (LUPM) yang merupakan lembaga bentukan dari PUPM, responden juga sering merekrut tenaga kerja untuk membantu mebantuu mengelolah usaha pertaniannya,dan juga responden sering bekerja lebih lama guna memperoleh upah atau hasil yang lebih banyak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Petani Padi Pada Aktivitas Kelembagaan PUPM di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Amruddin, S.Pt.,M.Si, selaku pembimbing I dan Sitti Khadijah Yahya Hiola, S.Tp.,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak H. Burhanuddin, S.Pi.,M.P, selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Dr. Sri Mardiyati, S.P.,M.P selaku ketua Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua ayahanda Bachtiar dan ibunda Nurhayati, dan kakak-kakakku tercinta Palmaisuri, S.Pd, Muhammad Amzar,S.Pd, dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Jurusan Agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali segudang ilmu kepada penulis.
6. Kepada pihak pemerintah Kecamatan Bontonompo Selatan khususnya kepada kepala Desa Jipang beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Daerah tersebut.
7. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi dari awal hingga akhir yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Semoga kristal-kristal Allah senantiasa tercurah kepadanya. Amin.

Makassar, April 2019

Muhammad Jamil

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian Partisipasi	5
2.1.1 Tipe Modal Petani Padi	9
2.1.2 Aktivitas Kelembagaan.....	10
2.1.3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan.....	11
2.1.4 Kelembagaan petani	12
2.2 Permasalahan dan Kelemahan Petani Padi.....	14

2.3	Kelembagaan Penyuluhan	17
2.4	Pengertian PUPM.....	21
2.5	Penelitian Terdahulu Tentang Partisipasi Petani.....	27
2.6	Kerangka Pemikiran.....	31
III.	METODE PENELITIAN.....	32
3.1	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32
3.2	Teknik Penentuan Sampel.....	32
3.3	Jenis Dan Sumber Data	32
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5	Teknik Analisis Data.....	34
3.6	Defenisi Operasional.....	35
IV.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.2	Kondisi Demografis	37
4.2.1	Pendidikan Masyarakat Desa Jipang	38
4.2.2	Perekonomian Masyarakat Desa Jipang	40
4.3	Kondisi Daerah Penelitian	42
V.	HASIL PEMBAHASAN	44
5.1	Identitas Responden	44
5.1.1	Umur Petani	44
5.1.2	Pendidikan	45
5.1.3	Pengalaman Usaha Tani	46
5.1.4	Jumlah Tanggungan Keluarga	47

5.1.5	Luas Lahan	48
5.2	Aktivitas Lembaga PUPM	49
5.3	Partisipasi Petani Padi	50
VI.	PENUTUP.....	57
5.1	Kesimpulan.....	57
5.2	Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA	60
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	62



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman	Teks	
3.1.		Jumlah Penduduk Desa Jipang.....	38
3.2.		Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	39
3.3.		Sarana Infrastruktur Pendidikan.....	40
3.4.		Profesi Penduduk	41
5.1.		Tingkat umur petani.....	45
5.2.		Tingkat pendidikanpetani.....	46
5.3.		Sebaran pengalaman bertani.....	47
5.4.		Sebaran Jumlah tanggungan keluarga.....	48
5.5.		Luas Lahan petani di Desa Jipang.....	48
5.6.		Hasil skoring Responden.....	52
5.7.		Hasil Skoring tingkat partisipasi responden petani padi di Desa Jipang...	53
5.8.		Distribusi frekuensi dan persentase skor.....	55

DAFTAR TABEL

NomorHalaman	Teks	
3.1.	Jumlah Penduduk Desa Jipang.....	38
3.2.	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	39
3.3.	Sarana Infrastruktur Pendidikan.....	40
3.4.	Profesi Penduduk	41
5.1.	Tingkat umur petani.....	45
5.2.	Tingkat pendidikanpetani.....	46
5.3.	Sebaran pengalaman bertani.....	47
5.4.	Sebaran Jumlah tanggungan keluarga.....	48
5.5.	Luas Lahan petani di Desa Jipang.....	48
5.6.	Hasil skoring Responden.....	52
5.7.	Hasil Skoring tingkat partisipasi responden petani padi di Desa Jipang...	53
5.8.	Distribusi frekuensi dan persentase skor.....	55

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan suatu usaha manusia untuk memperbaiki keadaan hidup dan memenuhi kebutuhan melalui kehidupan tumbuhan dan hewan. Pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai pembangunan ekonomi disektor pertanian. Meskipun demikian pembangunan pertanian tidak saja hanya dipandang dari segi ekonomi namun juga meliputi aspek sosial kelembagaan, teknologi, dan aspek lainnya.

Pembangunan pertanian memiliki peranan yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini dikarenakan kecukupan beras sebagai bahan makanan pokok penduduk Indonesia sebaiknya dipenuhi secara swasembada. Permintaan beras sebagai makanan utama sebagian besar penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan jumlah penduduk mendorong permintaan beras meningkat. Apabila tidak dilakukan peningkatan produktivitas dan perluasan areal panen, defisit beras di Indonesia akan meningkat sekitar 13,5 persen per tahun (Swastika, Hadi, & Ilham, 2000).

Harapan dari keluarga petani adalah mampu keluar dari situasi kemiskinan menuju kepada kesejahteraan keluarga. Puspitawati, Simanjuntak, dan Hayati (2012) menyatakan bahwa tujuan keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, baik kesejahteraan objektif maupun kesejahteraan subjektif. Tujuan terbentuknya keluarga adalah untuk mewujudkan keadaan sejahtera baik fisik, sosial, ekonomi, psikologis/ mental serta spiritual (Puspitasari, Puspitawari,

&Herawati, 2013). Kesejahteraan dapat diraih apabila semua sumber daya keluarga dapat dikelola dengan baik. Dalam konsepsi strategi nafkah, menurut Scoones (1998) keluarga memiliki 6 (enam) modal, salah satunya adalah modal politik, sedangkan Ellis (1998) hanya menyebutkan 5 (lima) modal yaitu modal manusia, modal finansial, modal fisik, modal sosial, dan modal alam. Sebagai upaya untuk keluar dari kondisi kemiskinan, keluarga akan mengubah strategi nafkah dengan menggunakan sumber-sumber nafkah yang mereka miliki yaitu modal alam, modal manusia, modal finansial, modal fisik dan modal sosial.

Desa Jipang merupakan suatu daerah yang terdapat pada Kabupaten Gowa tepatnya salah satu Desa yang ada di Kecamatan Bontonompo Selatan. Petani di Desa Jipang dalam bercocok tanam khususnya tanaman padi dilakukan apabila masuk musim hujan dan musim kemarau, hal itu dikarenakan adanya sumber air dari sungai dan irigasi di daerah tersebut. Daerah ini setiap tahunnya mengalami dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Petani pada wilayah ini tidak hanya mengandalkan sistem tadah hujan dalam mengelola pertaniannya, artinya untuk menunjang sistem pertanian yang ditekuni para petani selain mengandalkan curahan air hujan, juga air dari sungai dan air irigasi di wilayah pertanian tersebut, salah satu kendala para petani di wilayah ini pada proses pertanian adalah pada saat musim kemarau kering, hal itu di karenakan sumber air yang biasanya diperoleh dari sungai airnya asing karena pasangnyanya air dari laut. Lahan sawah di wilayah ini umumnya mempunyai produktivitas tanah dan tanaman yang tinggi, dan tingkat kesuburan tanah dan curah hujan yang menentu. Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa sudah ada PUPM yang telah di

bentuk oleh Kementerian Pertanian dimana pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) ini merupakan suatu terobosan sebagai solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan. Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok. Melalui PUPM, ketahanan pangan di Desa Jipang tetap stabil karena melalui PUPM masyarakat Desa Jipang lebih mudah dalam proses jual beli hasil pangan dan memperoleh bahan dan alat-alat pertanian yang berkualitas terutama bagi anggota kelompok tani dengan harga yang layak.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana partisipasi petani padi pada aktivitas kelembagaan PUPM Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui partisipasi petani padi pada aktivitas kelembagaan PUPM Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”.

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya:

1. Penulis : dapat mengetahui Partisipasi petani di Desa Jipang Pada Aktivitas Kelembagaan PUPM serta seperti apakah strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh petani.
2. Pembaca: semoga laporan ini kiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca, sebagai acuan apabila dibutuhkan dalam pembuatan skripsi selanjutnya serta dapat menambah pengetahuan yang lebih luas.

3. Pemerintah: Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan terhadap pemerintah dalam menentukan komoditas unggulan daerah sesuai dengan jenis tanaman yang banyak diusahakan oleh petani, serta faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani seperti alam, tenaga kerja dan modal.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Partisipasi Petani

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (*seperti padi, bunga, buah dan lain-lain*), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, seperti sereal untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol atau kapas untuk penenunan dan pembuatan pakaian.

Setiap orang bisa menjadi petani (asalkan punya sebidang tanah atau lebih), walau ia sudah punya pekerjaan bukan sebagai petani. Maksud dari kalimat tersebut bukan berarti pemilik tanah harus mencangkul atau mengolah sendiri tanah miliknya, tetapi bisa bekerjasama dengan petani tulen untuk bercocok tanam

di tanah pertanian miliknya. Apabila ini diterapkan, berarti pemilik tanah itu telah memberi pekerjaan kepada orang lain walau hasilnya tidak banyak. Apabila bermaksud mengolah sendiri, tentu harus benar-benar bisa membagi waktu, tetapi kemungkinan akan kesulitan kalau tanahnya lebih dari satu petak.

Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi petani adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik yang bergerak di bidang pertanian peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses pertanian serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan dalam hal pertanian.

Bentuk partisipasi yang nyata yaitu :

- Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.
- Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk

mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam partisipasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Keterlibatan petani dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pertanian.
2. Kemauan para petani untuk merespon dan berkreasi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pertanian.

Tujuan utama dari pertanian adalah memperbaiki dan menyuburkan kondisi lahan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Sumber daya lahan dan kesuburannya dipertahankan dan ditingkatkan melalui aktivitas biologi dari lahan itu sendiri, yaitu dengan memanfaatkan residu hasil panen, kotoran ternak, dan pupuk hijau. Produk pertanian dikatakan organik jika produk tersebut berasal dari sistem pertanian organik yang menerapkan praktik manajemen yang berupaya untuk memelihara ekosistem melalui beberapa cara, seperti pendaurulangan residu tanaman dan hewan, rotasi dan seleksi pertanaman, serta manajemen air dan pengolahan tanah (Sriyanto, 2010). Pertanian organik dapat diartikan sebagai suatu sistem produksi pertanaman yang berasaskan daur ulang-hara secara hayati. Daur ulang hara dapat melalui sarana limbah tanaman dan ternak, serta limbah lainnya yang mampu memperbaiki status kesuburan tanah dan struktur tanah (Sutanto, 2002). Landasan Teori Mikkelsen dalam Usman (2008), mengemukakan asumsi teorik bahwa pembangunan menjadi positif apabila ada partisipasi

masyarakat dan sebaliknya kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berarti adanya penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat itu sendiri dan secara eksternal terhadap pemerintah atau pelaksana program. Menurut Davis (2005) yang dikutip oleh Stepan (2011), ada tiga unsur penting partisipasi, yaitu:

1. Bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, tidak hanya semata-mata keterlibatan secara jasmaniah.
2. Kesiediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Unsur tanggung jawab, Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota kelompok tani.

Karakteristik sosial ekonomi tersebut meliputi:

1. Tingkat Pendidikan Menurut Mardikanto dalam Iwan (2010), menerangkan pendidikan merupakan proses timbal balik dari setiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, teman dan alam semesta.
2. Pengalaman Bertani Menurut Soekartawi (1999), pengalaman seseorang dalam berusaha tani berpengaruh dalam menerima inovasi dari luar.
3. Umur Menurut Ajiswarman dalam Rona (1999), orang yang masuk pada golongan tua cenderung selalu bertahan dengan nilai-nilai yang lama sehingga diperkirakan sulit menerima hal-hal yang bersifat baru.

4. Frekuensi mengikuti penyuluhan Menurut Soekartawi (1999), agen penyuluhan dapat membantu petani memahami besarnya pengaruh struktur sosial ekonomi dan teknologi untuk.
5. mencapai kehidupan yang lebih baik dan menemukan cara mengubah struktur atas situasi yang menghalangi untuk mencapai tujuan tersebut.
6. Luas lahan Menurut Iwan (2010), Luas lahan akan menentukan partisipasi petani terhadap proyek. Luas sempitnya lahan yang dikuasai akan mempengaruhi anggota untuk mengolah lahan.

2.1.1 Tipe Modal Petani Padi

Secara konseptual menurut Chambers dan Conway dalam Ellis (2000), terdapat lima tipe modal yang dapat dimiliki atau dikuasai Petani Padi untuk pencapaian nafkahnya yaitu:

1. Modal manusia yang meliputi jumlah (populasi manusia), tingkat pendidikan, keahlian yang dimiliki dan kesehatannya.
2. Modal alam yang meliputi segala sumberdaya yang dapat dimanfaatkan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Wujudnya adalah air, tanah, hewan, udara, pepohonan, dan sumber lainnya.
3. Modal sosial yaitu, modal yang berupa jaringan sosial dan lembaga dimana seseorang berpartisipasi dan memperoleh dukungan untuk kelangsungan hidupnya.
4. Modal finansial yang berupa kredit dan persediaan uang tunai yang bisa diakses untuk keperluan produksi dan konsumsi.

5. Modal fisik yaitu, berbagai benda yang dibutuhkan saat proses produksi, meliputi mesin, alat-alat, instrument dan berbagai benda fisik.

2.1.2 Aktivitas Kelembagaan

Salah satu sektor yang diharapkan dapat mewujudkan program nasional Nawa Cita adalah sektor pertanian. Program tersebut memprioritaskan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam pembangunan sektor pertanian kelembagaan petani mempunyai peran yang penting. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kelembagaan petani di Indonesia masih lemah dan adanya hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani. Kelembagaan petani diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi, namun sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal. Keberadaan kelembagaan petani bagi petani sudah menjadi keniscayaan untuk memperbaiki taraf hidup, harkat dan martabatnya.

Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian perlu dirancang dengan memberikan muatan (*content area*) pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan petani. Intervensi pemerintah dalam pengembangan kelembagaan petani ke depan masih diperlukan. Akan tetapi bentuk campur tangan pemerintah tidak bersifat koersif, namun lebih bersifat memfasilitasi sehingga mampu merangsang pertumbuhan kelembagaan yang

bersifat kohesif. Kesenjangan antara kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian yang ideal dengan kondisi riil di lapangan merupakan hal menarik yang perlu diteliti sehingga dapat dicari alternatif pemecahannya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk dan peran kelembagaan petani, (2) menganalisis peran penyuluhan dan pengaruh perubahan kelembagaan penyuluhan terhadap keefektifan penyuluhan dalam implementasi program pertanian modern. (3) menganalisis optimalisasi pemanfaatan alsintan dalam mendorong implementasi program pertanian modern, dan (4) menganalisis partisipasi, pengaruh, kepentingan, dan pola hubungan para pemangku kepentingan yang terkait dalam pengembangan model kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian, mendukung implementasi program pertanian modern.

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data Primer dikumpulkan melalui wawancara pada berbagai responden pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah, kelompok tani, penyuluh, petani, dan pengurus UPJA/penyedia jasa alsintan. Data sekunder berupa dokumen yang terkait dengan substansi penelitian yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait (termasuk juga dari media elektronik). Data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif eksplanatif dan analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*).

2. 1.3 Penguatan Kapasitas kelembagaan

Terdapat dua jenis pengertian kelembagaan yaitu kelembagaan sebagai aturan main dan kelembagaan sebagai organisasi. Sebagai aturan main

kelembagaan merupakan perangkat aturan yang membatasi aktivitas anggota dan pengurus dalam mencapai tujuan organisasi. Kelembagaan dalam arti organisasi biasanya menggambarkan aktivitas yang dikoordinasikan atas dasar melalui mekanisme administrasi atau komando.

Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan.

2.1.4 Kelembagaan petani

Pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok petani diperlukan dalam upaya meningkatkan daya saing petani dalam pengembangan sistem agribisnis di Indonesia. Upaya ini semakin diperlukan dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Kapasitas petani dapat meningkat sejalan dengan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani. Kapasitas petani dan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani akan mendorong kapasitas kelembagaan menjadi lebih efektif.

Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau *social interplay* dalam suatu komunitas. Kelembagaan pertanian juga memiliki titik strategis (*entry point*) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani). Saat

ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan (Suradisastra, 2008).

Peran kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian di Indonesia terutama terlihat dalam kegiatan pertanian tanaman pangan, khususnya padi. Di tingkat makro nasional, peran lembaga pembangunan pertanian sangat menonjol dalam program dan proyek intensifikasi dan peningkatan produksi pangan. Kegiatan pembangunan pertanian dituangkan dalam bentuk program dan proyek dengan membangun kelembagaan koersif (kelembagaan yang dipaksakan), seperti Padi Sentra, Demonstrasi Massal (Demas), Bimbingan Massal (Bimas), Bimas GotongRoyong, Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD) dan lain-lain. Kondisi di atas menunjukkan signifikansi keberdayaan kelembagaan dalam akselerasi pembangunan sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan hasil berbagai pengamatan yang menyimpulkan bahwa bila inisiatif pembangunan pertanian dilaksanakan oleh suatu kelembagaan atau organisasi, di mana individu individu yang memiliki jiwa berorganisasi menggabungkan pengetahuannya dalam tahap perencanaan dan implementasi inisiatif tersebut maka peluang keberhasilan pembangunan pertanian menjadi semakin besar (De los Reyes dan Jopillo 1986; USAID 1987; Kottak 1991; Uphoff 1992a; Cernea 1993; Bunch dan Lopez 1994 dalam Sradisastra, 2011).

2.2 Permasalahan dan kelemahan petani

Menurut Dimiyati (2007), permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia adalah:

1. Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran.
2. Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (*on farm*).
3. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.

Problem mendasar bagi mayoritas petani Indonesia adalah ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah, hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani. Menurut Branson dan Douglas, lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. Petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak punya jalur pemasaran sendiri, akibatnya petani menggunakan sistem tebang jual. Dengan sistem ini sebanyak 40% dari hasil penjualan panen menjadi milik tengkulak.

Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan akan memberikan keuntungan layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di sub sistem *on farm* dengan pelaku agribisnis di sub sektor hulu dan hilir. Kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai dengan peningkatan posisi tawar petani. Hal ini dapat dilakukan jika petani tidak berjalan

sendiri-sendiri, tetapi menghimpun kekuatan dalam suatu lembaga yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi mereka. Oleh karena itu penyuluhan pertanian harus lebih tertuju pada upaya membangun kelembagaan. Lembaga ini hanya dapat berperan optimal apabila penumbuhan dan pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh petani sehingga petani harus menjadi subjek dalam proses tersebut (Jamal, 2008).

Menurut Akhmad (2007), upaya yang harus dilakukan petani untuk menaikkan posisi tawar petani adalah dengan:

- 1) Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran.
- 2) Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besar dari banyak produsen. Efisiensi dapat dicapai karena dengan skala yang lebih besar dan terkoordinasi dapat dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan faktor produksi.
- 3) Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengikis jaringan tengkulak yang dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual. Upaya kolektifikasi tersebut tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang distributor dalam rantai

pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien dengan pemangkasan rantai tataniaga yang tidak menguntungkan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani (seperti: kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan permodalan) dan diharapkan dapat melindungi *bargaining position* petani. Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai produsen maupun penikmat hasil jerih payah usahatani mereka terutama diwujudkan melalui tingkat harga *output* yang layak dan menguntungkan petani.

Dengan demikian, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut juga untuk menghasilkan pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung SDA dan berbagai usaha untuk menopang dan menunjang aktivitas kehidupan pembangunan pertanian di pedesaan.

Lembaga di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sifatnya tidak linier, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, berupa kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hubungan sosial, pengakuan, dan pengembangan pengakuan. Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat (Elizabeth dan Darwis, 2003).

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu kelembagaan petani agar tetap eksis dan berkelanjutan adalah:

- 1) Prinsip otonomi (spesifik lokal)
- 2) Prinsip pemberdayaan
- 3) Prinsip kemandirian lokal

2.3 Kelembagaan Penyuluhan

Kelembagaan kelompok petani merupakan sarana sekaligus sasaran penyuluhan pertanian (Albrecht, H. et.al., 1989; Anonim, 2001; Mosher, 1991), sehingga keberadaannya sangat diperlukan. Kondisi dilematis biasanya timbul dari kelembagaan penyuluhan karena bias kepentingan. Penyuluh pertanian, baik pegawai pemerintah maupun swasta, merupakan anggota atau staf dari institusi yang menugaskannya sehingga tidak jarang dalam melakukan pekerjaannya lebih berorientasi pada kepentingan dinas daripada kepentingan petani. Berkaitan dengan situasi ini, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok petani memerlukan komitmen bagi kelembagaan penyuluhan, terutama kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, untuk melaksanakan tugas yang semestinya.

Secara umum kelembagaan penyuluhan di Indonesia sejak Pelita I sampai sekarang telah mengalami beberapa perubahan. *Pertama*, pada tahun 1970-1990, dimana secara kelembagaan penyuluh merupakan bagian dari program Bimbingan Massal (BIMAS) yang bertanggung jawab pada peningkatan komoditas pokok untuk memenuhi sasaran produksi maksimal. *Kedua*, pada tahun 1991 kelembagaan penyuluh di *set up* ulang, sehingga pengelolaan kelembagaan

penyuluh pertanian yang semula di Bimas diserahkan ke dinas-dinas teknis lingkup pertanian. Masa ini ditandai dengan munculnya BPP dan PPL Tanaman Pangan, BPP Perkebunan, BPP Perikanan, BPP Peternakan. PPL bersifat monovalen. *Ketiga*, pada tahun 1996-2000, kelembagaan penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota disatukan dalam wadah baru dengan Nomenklatur Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) dan di tingkat kecamatan BPP difungsikan kembali sebagai *home base* semua Penyuluh Pertanian yang bertugas di kecamatan.

Pada model kelembagaan pertama sampai ketiga, penentuan dan pengelolaan penyuluhan dilakukan dengan sistem sentralisasi. Keempat, pada tahun 2001-2005, kelembagaan penyuluh diserahkan kepada pemerintah daerah. Era ini menjadi awal dilaksanakannya desentralisasi program-program penyuluhan. Namun banyak daerah yang tidak siap sehingga penyuluhan menjadi “mati suri”. Kelima, pada tahun 2006-sekarang dilakukan revitalisasi penyuluhan pertanian dimana kelembagaan penyuluh di tingkat kabupaten dan kecamatan dihidupkan kembali yang dituangkan dalam UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan (SP3K), kelembagaan di Kabupaten Badan Pelaksana Penyuluhan (BAPELLUH) dan di kecamatan BPP. Hal ini dipertegas dengan Surat Menteri Pertanian No.157 yang isinya menyatakan bahwa dana dekonsentrasi dari Pusat hanya akan diberikan kepada kabupaten/ kota yang sudah membentuk Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan salah satu wadah organisasi yang terdapat dalam dinas pertanian. Fungsi utama dari kelembagaan penyuluhan

pertanian adalah sebagai wadah dan organisasi pengembangan sumberdaya manusia pertanian serta menyelenggarakan penyuluhan.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat adalah badan Pengembangan SDM pertanian, Departemen Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penyuluhan pertanian dengan Komisi penyuluhan pertanian nasional yang berfungsi menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijaksanaan nasional penyuluh pertanian dan bahan untuk memecah masalah dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian yang memiliki komposisi anggota 60% unsur non pemerintah dan 40% unsur pemerintah. Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah BPP atau lembaga lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dan ditetapkan dengan peraturan daerah dan SK bupati. Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat desa adalah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pertanian pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi sendiri. Penyuluhan, menurut Van den Ban dan Hawkins (1999), diartikan sebagai proses yang membantu petani dalam menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan kedepan, meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan wawasan terhadap suatu masalah, serta membantu menyusun kerangka berdasarkan pengetahuan yang dimiliki petani, memperoleh pengetahuan khusus berkaitan dengan cara pemecahan masalah yang dihadapi serta akibat yang ditimbulkan, memutuskan pilihan yang tepat yang menurut pendapat petani sudah optimal, meningkatkan motivasi petani untuk menetapkan pilihannya, dan

mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan dalam membentuk pendapat dan mengambil keputusan.

Mengembangkan kapasitas kelembagaan kelompok petani adalah wujud nyata dari tugas kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah di tingkat provinsi, sesuai Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-undang Sistem Penyuluhan, yaitu: "memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah" dan tugas kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah tingkat kabupaten, sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf e, yaitu: "menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha".

Salah satu langkah-langkah tindakan menuju kelembagaan kelompok petani yang efektif adalah melalui peningkatan dukungan penyuluhan pertanian, meliputi :

- a. Meningkatkan kompetensi penyuluh dalam memfasilitasi petani, meliputi: penguasaan materi, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap sasaran serta adanya komitmen terhadap profesi.
- b. Penggunaan pendekatan penyuluhan yang tepat sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran, meliputi: kesesuaian informasi, ketepatan metode, penggunaan berbagai teknik penyuluhan dan penggunaan media dalam penyuluhan.

- c. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, meliputi: ketersediaan programnya penyuluhan, kemudahan akses, dukungan fasilitas yang diperlukan, dan pelaksanaan program.

Peranan penyuluh pertanian sebagai fasilitator, motivator dan pendukung gerak usaha petani merupakan titik sentral dalam memberikan penyuluhan kepada petani, berkaitan dengan pengelolaan usaha tani yang berkesinambungan dan ramah lingkungan. Kesalahan dalam memberikan penyuluhan kepada petani nantinya akan menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan lingkungan.

2.4 Pengertian PUPM

Kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) merupakan salah satu kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan dalam upaya untuk: (1) menjaga harga di tingkat produsen dan konsumen, (2) memotong rantai pasok, (3) mempermudah aksesibilitas harga pangan di tingkat konsumen, (4) mengurangi keuntungan pedagang perantara, dan (5) merubah struktur pasar.

Kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) mulai berjalan sejak tahun 2016 dengan dukungan dana APBN melalui dana dekonsentrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan Provinsi.

Harga komoditas pangan yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani, pelaku distribusi, dan konsumen baik secara ekonomi maupun kesejahteraan. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan fluktuasi harga dengan mengacu kepada permasalahan utama yang

terjadi selama ini yaitu tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik di tingkat produsen maupun dari tingkat konsumen.

Berdasarkan permasalahan di atas, Kementerian Pertanian melakukan terobosan sebagai solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan yaitu melalui kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM). Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya *Patron-Client* (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan *marketpower* oleh pelaku usaha tertentu.

Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrumen yang dibuat Pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat. Kegiatan PUPM telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 di 20 (dua puluh) provinsi dan di 7 (tujuh) provinsi di Tahun 2017. Pada Tahun 2018 kegiatan dikembangkan dengan beberapa

penyempurnaan konsep dan teknis pelaksanaan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan PUPM tahun 2016 dan tahun 2017 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Tujuan pelaksanaan kegiatan PUPM yaitu:

- menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis.
- mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis, dan
- memberikan kemudahan akses konsumen/ masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas, dengan harga yang wajar.

Pelaksanaan kegiatan PUPM dilakukan melalui dukungan dana APBN melalui alokasi dana Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dalam bentuk dana dekonsentrasi yang diberikan kepada Dinas/Badan/Kantor Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan. Dana yang dialokasikan tersebut disalurkan kepada LUPM yang bergerak di bidang pangan dalam bentuk dana Bantuan Pemerintah untuk melakukan pembelian pangan pokok dan strategis dari petani/mitra dan selanjutnya memasok pangan pokok dan strategis tersebut kepada TTI untuk dijual kepada konsumen dengan harga yang layak.

Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada LUPM disalurkan mulai bulan Februari 2018 setelah semua persyaratan pencairan dana dipenuhi. Dana yang telah disalurkan kepada LUPM dimanfaatkan sesuai dengan RUK berdasarkan kebutuhan dan hanya digunakan di tahun berjalan. Jika terdapat dana yang tidak

digunakan harus disetor ke kas negara di akhir tahun 2018 atau tahun berikutnya 2019.

Kebijakan penyaluran distribusi pangan, Kementerian Pertanian. Badan Ketahanan Pangan sebagai pelaksana kegiatan PUPM dapat berkoordinasi dengan Perum BULOG, Kementerian Perdagangan dan instansi lain terkait, untuk mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan yang menjadi tugas bersama Kementerian/Lembaga terkait. Model PUPM dalam kegiatan ini terdiri dari empat bentuk, yaitu pelaksana kegiatan PUPM Tahap Penumbuhan (Tahun 2018), pelaksana kegiatan PUPM Tahap Pengembangan (ditumbuhan Tahun 2017), pelaksana kegiatan PUPM Tahap Pembinaan (ditumbuhan tahun 2016), dan pelaksana PUPM Binaan Provinsi.

Sebagai bagian dari upaya pembangunan ketahanan pangan, kegiatan PUPM tetap menggunakan ruh kedaulatan pangan sehingga pada prinsipnya pangan pokok dan strategis yang dipasok ke TTI semaksimal mungkin berasal dari produksi dalam negeri. Untuk pangan strategis yang tidak dihasilkan oleh petani dapat melibatkan industri pangan dan importir guna aksesibilitas pangan konsumen dapat terjangkau, antara lain daging, gula pasir dan minyak goreng. Keberhasilan kegiatan PUPM sangat ditentukan oleh kerjasama yang terjalin serta komitmen dari seluruh pihak mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Dalam konteks regulasi, guna mengatur dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, telah terbit 2 (dua) Undang-Undang terkait stabilitas harga pangan, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli di tingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen.

Peningkatan harga komoditas pangan memang dapat berasal dari produsen, namun sumber peningkatan harga tersebut biasanya lebih bersifat fundamental karena di dorong oleh meningkatnya harga input/sarana produksi atau karena faktor kebijakan pemerintah seperti penetapan harga dasar (*floor price*). Sementara peningkatan harga yang didorong oleh faktor distribusi bersifat variabel, seperti panjangnya rantai jalur distribusi, hambatan transportasi dan perilaku pedagang dalam menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang. Tingginya volatilitas harga komoditas yang terjadi selama ini mengindikasikan bahwa faktor distribusi sangat berpengaruh.

Di sisi lain dari segi perdagangan dalam negeri yang perlu mendapat perhatian adalah pada fungsi pasar sebagai lembaga yang sangat penting dalam sistem distribusi komoditas tersebut di pasar. Kemampuan dalam pengendalian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap distribusi komoditas pangan disinyalir dapat mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari komoditas pangan. Salah satu domain yang perlu diperhatikan dalam aliran komoditas pertanian adalah pasar induk atau pusat distribusi pangan suatu komoditas. Pusat distribusi

pangan atau pasar induk adalah tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan atau luar negeri.

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang mengacu pada permasalahan utama yang terjadi selama ini yaitu tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen.

Berdasarkan permasalahan diatas, Kementerian Pertanian melakukan terobosan sebagai solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan yaitu melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya *Patron-Client* (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan *market power* oleh pelaku usaha tertentu.

Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrumen yang dibuat Pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu Tentang Partisipasi Petani

Penelitian Saptana *et al.* (2003) merupakan penelitian yang cukup berbeda. Jika biasanya objek studi di PSE-KP adalah petani dan rumah tangganya, dalam penelitian ini objeknya adalah organisasi-organisasi petani. Dengan membandingkan berbagai jenis dan tipe organisasi, diperoleh pengetahuan yang agak berbeda dari studi-studi sejenis selama ini.

Dengan mencermati rancangan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan pertanian selama ini, diperoleh gambaran bahwa tujuan pembentukan organisasi petani oleh pemerintah masih terfokus upaya pada peningkatan produksi melalui penerapan teknologi produksi, untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal belaka, dan lebih untuk tujuan distribusi bantuan dan memudahkan kontrol. Bentuk keorganisasian yang dikembangkan bersifat seragam dan terlalu biasa pada usahatani padi sawah. Pembinaan cenderung individual dengan menggunakan prinsip *trickle down effect*, introduksi inovasi lebih menekankan pada pendekatan budaya material dibanding nonmaterial. Introduksi kelembagaan baru umumnya telah merusak kelembagaan lokal yang

telah ada sebelumnya. Di sisi lain, sikap dan tindakan (aparatur) pemerintah tampaknya memiliki pengetahuan yang lemah dalam pemahaman di bidang lembaga dan organisasi.

Nilai-nilai kolektivitas petani belum dijadikan basis organisasi ekonomi perdesaan. Masih dipertahankannya sistem kemitraan yang mengandung unsur interdependensi yang sangat asimetris antar pelaku agribisnis di perdesaan.

Penelitian juga menemukan adanya tiga tahapan besar pengembangan organisasi petani. Satu, pada *Tahap Masyarakat Komunal*, dimana ketergantungan antar penduduk tinggi dan campur tangan pihak luar rendah, ciri umum keorganisasian pada era ini adalah jumlah organisasi relatif sedikit namun fungsinya banyak (*multi purposed*). Pada tahap kedua, yakni semasa Orde Baru, berlangsung Penghancuran Masyarakat Komunal, dimana invansi kekuatan atas desa terhadap masyarakat desa begitu tinggi. Pada masa ini, terjadi perombakan struktur keorganisasian yang ada. Namun di Bali, introduksi organisasi baru tidak diikuti dengan perusakan organisasi tradisional yang sudah ada. Sehingga saat ini ditemukan adanya Banjar Dinas dan Banjar Adat, Desa Dinas dan Desa Adat serta lembaga pengairan dan Subak.

Tahap ketiga, terjadi penyusunan Komunalitas Baru, dimana pemerintah mulai beralih dengan pendekatan baru yang lebih menghargai komunalitas lokal. Peran kepemimpinan lokal kembali direvitalisasi. Dua kasus organisasi baru yang menggunakan pendekatan ini adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dan Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) di Bengkulu.

Berbagai bentuk transformasi keorganisasian ditemukan, yaitu dapat berupa penggantian struktur atau hanya penambahan struktur, namun ada juga transformasi pada aspek tujuan (perubahan atau perluasan tujuan), maupun norma-norma yang dijadikan pegangannya. Transformasi pada beberapa subak di Bali adalah berupa penambahan struktur baru.

Satu temuan yang menarik dari studi ini adalah bahwa telah berlangsung adanya tiga periodisasi pengembangan organisasi petani merupakan sesuatu yang baru. Pola seperti ini sebenarnya sudah berlangsung masif di berbagai wilayah di Indonesia. Namun pembabakan seperti ini belum cukup detail menggambarkan proses yang berlangsung.

Penelitian lain yang juga mempelajari organisasi milik petani dilakukan Suhaetiet *al.* (2009). Penelitian tentang integrasi P3A dengan kelompok tani dan Gapoktan dilakukan di Provinsi Bali, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menemukan bahwa pemahaman Pemda dalam pemberdayaan masyarakat masih terbatas pada aspek bantuan fisik, belum pada peningkatan kapasitas SDM secara terprogram. Di sisi organisasi petani, kapasitas SDM masih terbatas sehingga peran kepemimpinan organisasi hanya dipegang oleh segelintir orang. Akibatnya, manfaat terbesar dari berbagai bantuan lebih banyak dinikmati bukan oleh anggota organisasi. Khusus di Bali, pemilihan ketua subak dilaksanakan secara demokratis dan mandiri.

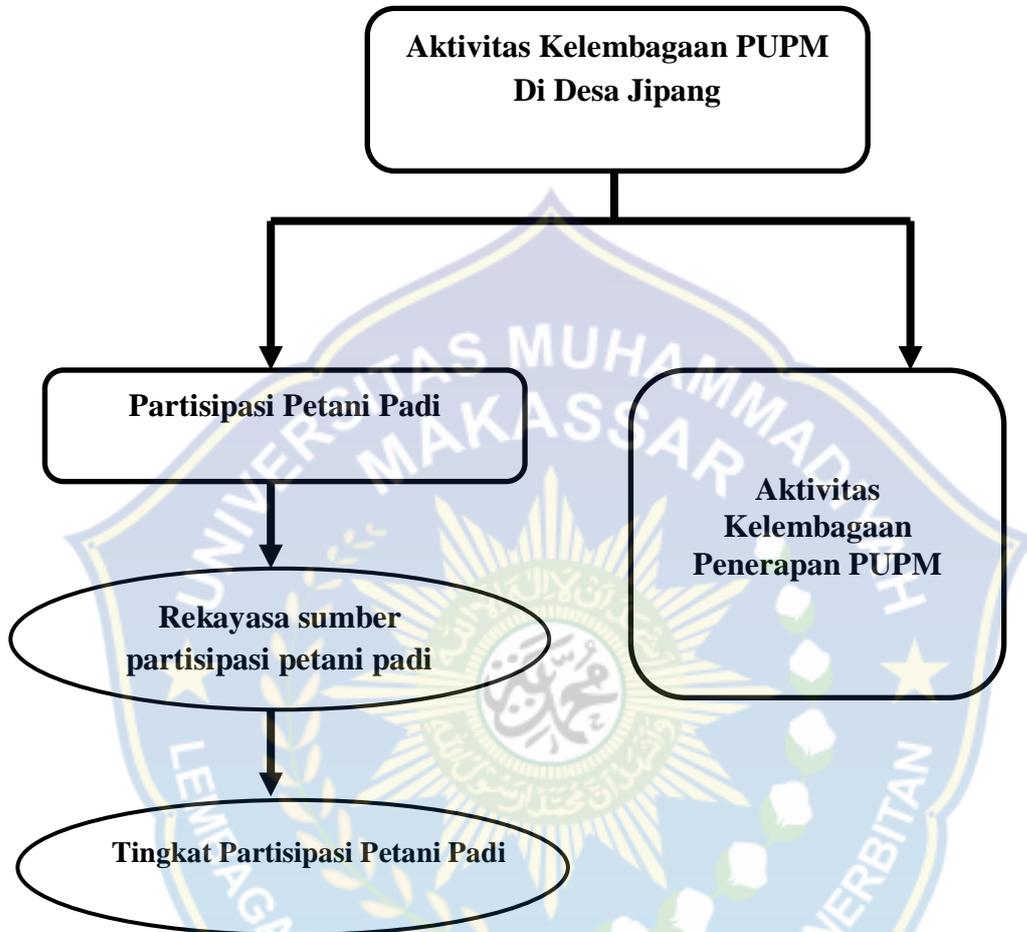
Dalam hal persepsi terhadap organisasi petani, sebagian petani peduli dan berharap organisasi mampu mengangkat kesejahteraan mereka, namun sebagian tidak peduli serta pesimis. Berbagai organisasi yang berada di tingkat desa

termasuk P3A/HIPPA dan kelompok tani, seharusnya berada dalam suatu payung organisasi ekonomi dalam arti luas, sehingga mampu mentransformasi nilai-nilai pembangunan seutuhnya kepada masyarakat desa. Organisasi dan jaringan organisasi ini harus berbadan hukum dan bergerak dari hulu sampai ke hilir.

Dalam hal pengintegrasian, wacana untuk menempatkan Gapoktan sejajar dengan subak dirasakan akan menjadi ancaman bagi keberadaan subak di masa mendatang. Petani menginginkan Gapoktan hanya menjadi bagian dari subak. Dari sisi kebijakan, agar terwujud integrasi, perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembentukan P3A, HIPPA, dan kelompok tani. Kebijakan ini perlu menghargai persepsi petani dan mengakomodasi ciri khas masing-masing komunitas.



2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Partisipasi Petani Padi pada Aktivitas Kelembagaan PUPM di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2019 yang berlokasi di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

3.2 Teknik Penentuan Sampel

Populasi petani di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa sebanyak 200 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* atau sengaja dengan mengambil 10%, sehingga sampel penelitian ini adalah rumah tangga petani yang ada di Desa Jipang sekitar 20 orang, yang diambil yakni sekitar 20 orang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis-Jenis data yang di gunakan yaitu:

1. Data kualitatif

Data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Contohnya kondisi barang (jelek, sedang, bagus).

2. Data kuantitatif

Data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Contohnya tinggi harga, umur, jumlah benda dan penghasilan seseorang.

Adapun sumber data yang di gunakan penulisan ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari wawancara langsung dengan responden di Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur- literatul atau pustaka dan instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

1. Observasi yaitu pengambilan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung pada petani yang ada di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

2. Wawancara yaitu pengumpulan data primer dengan mengajukan pertanyaan yang sistematis dan langsung kepada responden dengan menggunakan alat bantu pedoman wawancara. Untuk memudahkan dalam proses interview digunakan kuisioner/daftar pertanyaan yang diberikan kepada setiap petani/responden.

3. Dokumentasi yaitu dengan mengambil gambar atau foto-foto dilokasi penelitian.

3.5 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan masalah yang diteliti telah diperoleh secara lengkap ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dengan metode skoring. Metode skoring/scoring adalah metode pemberian skor terhadap masing-masing value parameter lahan untuk menentukan tingkat kemampuan lahannya.

Skor ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ada, teknik pemberian skor ada 3 macam antara lain dengan pemberian skor 1 pada nilai yang rendah, pemberian skor 2 pada nilai yang sedang, dan pemberian skor 3 pada nilai yang tinggi, lalu di bagi dengan banyaknya pertanyaan.

Rumus:

$$Z = \frac{X-Y}{K}$$

Keterangan :

Z = Interval

X = Nilai Tertinggi

Y = Nilai Terendah

K = Banyaknya Kategori

Dan

3 = Nilai Tertinggi $\frac{3-1}{3} = \frac{2}{3} = 0,66$

2 = Nilai Sedang

1 = Nilai Terendah

Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel peneliti.

3.6 Defenisi Operasional

1. Partisipasi petani merupakan suatu usaha manusia untuk ikut serta memperbaiki keadaan hidup dan memenuhi kebutuhan melalui kehidupan tumbuhan dan hewan. Cara seorang petani berpartisipasi pada aktivitas lembaga PUPM di Desa Jipang dengan cara menjual kelebihan hasil pangan kepada lembaga usaha pangan masyarakat (LUPM) dan juga membeli alat dan bahan-bahan pertanian pada toko tani indonesia(TTI).
2. Kelembagaan merupakan suatu lembaga yang berperan aktif di masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga tercapai swasembada pangan khususnya dalam bidang pertanian. Kelembagaan yang menjadi fokus adalah PUPM.
3. Tingkat partisipasi merupakan sebuah ukuran seorang petani berpartisipasi dalam suatu bidang pertanian untuk melihat tingkat partisipasi dari kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Tingkat partisipasi petani padi dengan melalui wawancara langsung dengan responden melalui beberapa sampel sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat partisipasi petani pada umumnya.

4. Petani padi merupakan seseorang yang berperan aktif dalam hal pertanian untuk kelangsungan hidup masyarakat karna padi merupakan bahan pangan khususnya di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.



IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Letak Geografis

Desa jipang Memiliki luas kurang lebih 13 KM yang terletak di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Desa Jipang memiliki batas-batas wilayah Desa/Kelurahan yaitu :

- Disebelah utara : Perbatasan dengan Desa Kaluarrang Kab. Gowa
- Disebelah timur : Perbatasan dengan Kelurahan Pattallassang Kabupaten Takalar
- Disebelah selatan : Perbatasan dengan Desa Pa'batangang Kabupaten Takalar
- Disebelah barat : Perbatasan Dengan Desa Paddinging Kabupaten Takalar

Berdasarkan pemerintahannya desa jipang terbagi atas 5 dusun yaitu Dusun Jipang, Dusun Alluka, Dusun Soreang, Dusun Pangkaje'ne dan Dusun Sampoletana. Jarak dari Desa Jipang Ke Kota Kabupaten Gowa Kurang Lebih 30 km.

4.2 kondisi Demografis

Keadaan Demografi Desa Jipang jika dilihat dari jumlah penduduk. Jumlah penduduknya pada tahun 2017 tercatat sebanyak 3487 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 855 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk di Desa Jipang

Jenis Kelamin	Jumlah(Jiwa)
Laki-laki	1630
Perempuan	1857
Jumlah	3487

Sumber: Monografi Desa Jipang (2017).

Dari data tabel di atas dilihat jumlah keseluruhan, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, yakni jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1857 orang, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1630 orang sehingga total penduduk Desa Jipang sebanyak 3487 jiwa.

4.2.1 Pendidikan Masyarakat Desa Jipang

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan juga menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa, dan menumbuhkan kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan. Karena tujuan dalam menempuh pendidikan adalah untuk memberikan suatu pengetahuan agar dapat mencerdaskan bangsa, sehingga

anak-anak bangsa mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang di masa depan.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Jipang digolongkan menjadi dua macam yaitu tingkat pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pada pendidikan formal jumlah masyarakat yang lulusan pendidikan formal berjumlah 2576 orang dengan perincian sebagai berikut, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Dasar berjumlah 836 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Pertama berjumlah 420 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Atas berjumlah 847 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Akademi/D1-D3 berjumlah 125 orang, dan jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sarjana/S1-S3 berjumlah sebanyak 348 orang.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Jipang

Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase(%)
Sekolah Dasar (SD)	836	32,46
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	420	16,30
Sekolah Menengah Atas	847	32,88
Akademi/ D1-D3	125	4,85
Sarjana/ S1-S3	348	13,51
Jumlah	2576	100

Sumber: Data Monografi Desa Jipang tahun 2017

Dari data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Jipang berpendidikan akhir Sekolah Dasar yang jumlahnya mencapai 836 orang. Dari

banyaknya masyarakat yang berpendidikan akhir Sekolah Menengah Atas maka masyarakat Desa Jipang tergolong yang mempunyai SDM yang baik.

Selain pendidikan formal, masyarakat Desa Jipang juga ada yang berpendidikan non formal seperti mengaji diniyah dan TPQ/TPA yang tersebar pada 2 gedung di wilayah Desa dengan jumlah murid sebanyak 125 orang.

Secara infrastruktur pendidikan Desa Jipang bisa dikatakan sangat maju, baik sarana pendidikan formal maupun non formal. Di Desa Jipang terdapat sarana pendidikan formal terdiri dari gedung sekolah Taman Kanak-Kanak sebanyak 1 gedung, sekolah PAUD sebanyak 1 gedung, gedung SD sebanyak 3 gedung, gedung SMP tidak ada dan , untuk SMA tidak ada gedung sekolah

Tabel 3.3. Sarana Infrastruktur Pendidikan di Desa Jipang

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sekolah PAUD	1 Gedung
Taman Kanak-Kanak (TK)	1Gedung
Sekolah Dasar (SD)	3 Gedung
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Tidak ada
Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tidak ada
Sekolah Menengah Kejuruan	Tidak ada
TPA/TPQ	2 Gedung

Sumber: Data Monografi Desa Jipang tahun 2017

4.2.2 Perekonomian Masyarakat Desa Jipang

Masyarakat Desa Jipang mayoritas pendapatan utamanya adalah sebagai petani sawah (padi, hortikultura), perkebunan dan perdagangan. Penghasilan yang diperoleh dari hasil pertanian khususnya tanaman padi dapat dikatakan mencukupi dalam memenuhi kebutuhan keluarga, karena dalam bercocok tanam petani

dilakukan dua kali dalam setahun atau saat memasuki musim hujan dan musim kemarau karna adanya aliran sungai dan irigasi sebagai sumber aliran air. Petani di Desa Jipang berjumlah sebanyak 1595 orang, yang mana jumlah tersebut dapat dikatakan sebagian besar penduduk Desa Jipang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani lebih besar dibandingkan dengan profesi lainnya.

Masyarakat Desa Jipang juga memiliki bermacam-macam pekerjaan antara lain diantaranya yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tercatat sebanyak 451 orang, Militer tercatat sebanyak 25 orang, swasta tercatat sebanyak 699 orang, pedagang tercatat sebanyak 499 orang dan pertukangan tercatat sebanyak 218 orang.

Tabel 3.4 Profesi Penduduk di Desa Jipang

Profesi Penduduk	Jumlah	Presentase(%)
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	451	12,93
Militer	25	0,72
Swasta	699	20,04
Pedagang	499	14,32
Pertukangan	218	6,25
Petani	1595	45,74
Jumlah	3487	100

Sumber: Data Monografi Desa Jipang tahun 2017

Dengan banyaknya masyarakat Desa Jipang yang bekerja sebagai petani, keadaan perekonomian Desa Jipang bisa dikatakan menengah kebawah. Hal ini dapat diketahui peneliti dari hasil wawancara dengan Bapak Muh Saleh Dg Malu (58 tahun) yang bekerja sebagai tukang kayu dan juga sebagai petani. Rata-rata anggaran yang dibutuhkan untuk belanja sehari adalah Rp. 40.000,-, dengan H.B.Dg Rowa (76 tahun) yang bekerja sebagai petani anggaran yang dibutuhkan

untuk belanja sehari-hari adalah Rp. 35.000,-, dengan Jamaluddin Dg Kulle (52 tahun) yang bekerja sebagai petani sekaligus beliau bekerja sebagai pedagang yang rata-rata anggaran untuk belanja sehari-hari sebesar Rp. 40.000.

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Jipang, dapat diprediksi bahwa pengeluaran sehari-hari masyarakat Desa Jipang untuk anggaran belanja tergolong masyarakat yang mempunyai kebutuhan konsumtif rendah, itu juga belum termasuk pengeluaran yang tak terduga.

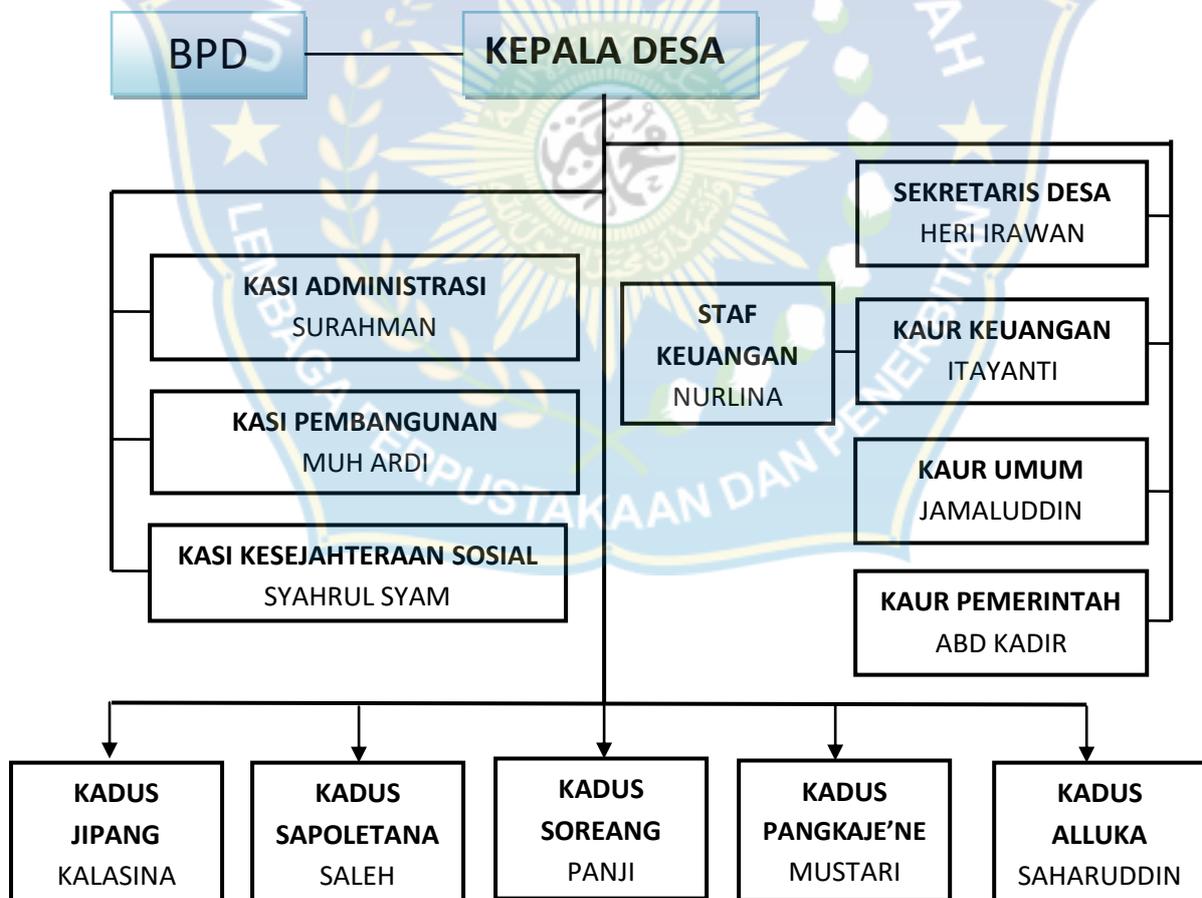
4. 3 Kondisi Daerah Penelitian

Desa Jipang yang berada di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa ini berjarak sekira 30 Km dari ibu kota Kabupaten Gowa. Ibu kota kecamatan Bontonompo Selatan berada di Desa Bontoramba. Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan merupakan Desa yang wilayahnya berada diujung Sebelum Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan di Kabupaten Gowa yang sebagian besar berbatasan dengan Kabupaten Takalar. Bontonompo Selatan lazim disingkat dengan nama "Bonsel". Seluruh wilayahnya merupakan pemekaran dari kecamatan Bontonompo. Bonsel beribukota di Bontoramba. Secara administrasi terbagi dalam sembilan desa dan kelurahan, dengan luas wilayah 29,24 km². Jumlah penduduk tahun 2012 sebesar 29.235 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 1.000 jiwa per km².

Berdasarkan hasil penelitian pada Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa diketahui Kepala Desa berdasarkan masa kerjanya yaitu

- Nama : Facharuddin
- Menjabat Tahun : 1963-1999
- Nama : Irham Facharuddin
- Menjabat Tahun : 1999-2009
- Nama : Rosdiati Madjid, SE
- Menjabat Tahun : 2009-2019

Dari hasil analisis diatas dapat dijabarkan struktur Desa Jipang Periode 2014-2019 yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan pada bab ini berdasarkan pada seluruh data yang berhasil dikumpulkan pada saat penulis melakukan penelitian dilapangan yaitu di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Adapun data yang dimaksud dalam hal ini merupakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara secara langsung dengan responden yang telah dipilih, Serta melakukan observasi lapangan. Selanjutnya, melakukan analisis data dengan teknik penentuan skoring yang dilakukan oleh penulis.

Data ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian ataupun wawancara dari beberapa responden petani padi yang berada di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

5.1 Identitas Responden

Salah satu identitas responden yang dapat dilihat berdasarkan hasil pengamatan langsung ataupun penelitian dilapangan berbeda-beda usia dan kemampuan seorang petani padi karna ingin diukur seberapa besar partisipasi masyarakat dalam melakukan proses pertanian.

5.1.1 Umur Petani

Berdasarkan data responden yang dilakukan umur petani rata-rata sebesar 45 tahun. Kisaran umur petani responden antara 26-69 tahun. Sebaran petani berdasarkan umur produktif di bagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu kelompok umur 26 merupakan kelompok usia produktif dan 69 tahun merupakan kelompok usia

non produktif. Adapun sebaran petani berdasarkan umur produktif dapat di lihat pada tabel lampiran 5.1

Tabel 5.1 Tingkat Umur Petani Responden di Desa Jipang

No	Kelompok umur	Jumlah Orang	Persentase(%)
1	26-40	10	40
2	41-54	13	52
3	55-69	2	8
4	Jumlah	25	100

Sumber : Data Primer Setelah diolah, 2019

Pada tabel 5.1 dapat kita lihat bahwa petani di daerah penelitian berada pada usia produktif secara ekonomi, dimana petani cukup potensial untuk melakukan kegiatan usaha taninya. umur produktif secara ekonomi dapat diartikan bahwa pada umumnya tingkat kemauan, semangat, dan kemampuan dalam mengembangkan usaha tani cenderung masih sangat tinggi.

5.1.2 Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan juga menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa, dan menumbuhkan kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan.

Tabel 5.2. Tingkat Pendidikan Responden Petani di Desa Jipang

No	Kelompok Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase(%)
1	SD	10	40
2	SMP	6	24
3	SMA	9	36
4	Jumlah	25	100

Sumber : Data Primer Setelah diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat, dari jumlah responden sebanyak 25 petani, pendidikan responden lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 10 orang, SMP sebanyak 6 orang dan lulusan SMA sebanyak 9 orang.

5.1.3 Pengalaman Usaha Tani

Pengalaman berusaha tani merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha tani. Petani yang memiliki pengalaman usaha tani yang tinggi cenderung lebih terampil dalam mengelola usaha taninya. Lama berusaha tani dijadiakann sebagai motivasi ke arah yang lebih baik dalam berusaha tani. Pengalaman usaha bertani dapat di lihat pada tabel 5.3

Tabel 5.3. Sebaran Pengalaman Bertani Responden di Desa Jipang

No	Kelompok Usaha Tani	Jumlah Orang	Persentase(%)
1	10-20	8	32
2	21-31	8	32
3	32-40	9	36
4	Jumlah	25	100

Sumber : Data Primer Setelah diolah, 2019

Pada tabel 5.3 dapat diketahui bahwa mayoritas petani memiliki pengalaman menjadi anggota kelompok tani selama 10-40 tahun. Pengalaman berusaha tani yang paling banyak adalah 32-40 tahun yaitu sebanyak 9 orang, sedangkan umur 10-20 dan 21-31 jumlahnya sama banyak yakni sebanyak 8 orang.

5.1.4 Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga adalah keseluruhan anggota keluarga yang berada pada satu rumah yang menjadi tanggungan kepala keluarga. Sebaran jumlah tanggungan keluarga dapat dilihat pada tabel 5.4

Tabel 5.4. Sebaran Jumlah Tanggungan Keluarga Responden di Desa Jipang

No	Kelompok Tanggungan keluarga	Jumlah Orang	Persentase(%)
1	2-4	17	68
2	5-7	6	24
3	8	2	8
4	Jumlah	25	100

Sumber : Data Primer Setelah diolah, 2019

5.1.5 Luas Lahan

Merupakan areal yang digunakan petani dalam bercocok tanam yang dimiliki setiap rumah tangga petani di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

Tabel 5.5. Luas Lahan Responden Petani di Desa Jipang

No	Kelompok Luas Lahan	Jumlah Orang	Persentase(%)
1	21-42	12	48
2	43-64	9	36
3	65-86	4	16
4	Jumlah	25	100

Sumber: Data Primer setelah diolah, 2019

Pada tabel diatas luas lahan dapat dilihat pada kelas pertama 21-42 are sebanyak 12 orang dengan persentase 48 % pada kelas kedua 43-64 are sebanyak 9 orang dengan persentase 36% dan pada kelas ketiga 65-86 are sebanyak 4 orang dengan persentase 16 %.

5.2 Aktivitas Lembaga PUPM

Aktivitas PUPM merupakan salah satu upaya pemerintah guna menstabilkan harga pangan kepada masyarakat khususnya pada bidang pertanian. Adapun aktivitas PUPM di Desa Jipang diantaranya :

1. Penyediaan alat-alat pertanian, salah satu aktivitas PUPM dengan adanya alat-alat pertanian sangat berperan penting dalam masyarakat khususnya pada aktivitas pertanian. Karna alat-alat pertanian dapat mempermudah pekerjaan pertanian yang tidak menggunakan waktu yang lama bagi seorang petani. Maka dari itu PUPM menyediakan toko khusus alat-alat pertanian atau (TTI) yang menjual alat dan bahan yang berkualitas baik, dan murah seperti Traktor, mesin pompa, cangkul pupuk, pastisida, bibit dan sebagainya.
2. Membentuk Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) sebagai pengumpul hasil pertanian yang diolah oleh seorang petani seperti padi, jagung dan sebagainya dengan harga yang layak, guna memotong rantai pasok pengumpul hasil pertanian liar yang merugikan petani dalam penjualan kelebihan hasil pangan.
3. PUPM menyediakan sarana dan prasaranan pengolahan hasil pertanian dari petani seperti halnya pada pabrik penggilingan, mesin pengeringan padi, gudang pengumpul hasil pertanian

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa aktivitas PUPM ini tujuannya di bentuk oleh Kementrian Pertanian di Desa Jipang guna diantaranya untuk:

- a) Menstabilkan harga pangan
- b) Memotong rantai pasok
- c) Memberikan bantuan kepada pelaku usaha tani
- d) Mempermudah proses pertanian khususnya di Desa Jipang ini.

5.3 Partisipasi Petani Padi

Partisipasi petani merupakan suatu usaha manusia untuk ikut serta memperbaiki keadaan hidup dan memenuhi kebutuhan melalui kehidupan tumbuhan dan hewan. Pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai pembangunan ekonomi di sektor pertanian. Partisipasi seorang petani sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia yang menjadi dasar penghubung suatu pertanian. Adapun petani berpartisipasi pada aktivitas lembaga PUPM di Desa Jipang yaitu sebagai berikut :

1. Menjual kelebihan hasil pangan kepada lembaga usaha pangan masyarakat (LUPM), hasil-hasil pertanian seorang petani dijual kepada lembaga usaha pangan masyarakat yang kemudian diolah dan di jual kembali oleh Bulog untuk dijual kembali ketoko tani sebagai bibit dan bahan pangan beras yang unggul dan berkualitas.
2. Membeli alat dan bahan-bahan pertanian pada toko tani indonesia(TTI), seorang petani membeli alat dan bahan-bahan pertanian pada lembaga usaha

pangan masyarakat untuk dapat mempermudah pekerjaan seorang petani dilahan pertaniannya.

3. Melakukan pengolahan pada gudang yang telah disediakan oleh PUPM pasca panen, menerima jasa penggilingan, pengeringan pada pasca panen.
4. Ikut dalam keanggotaan kelompok tani, untuk mengetahui cara bertani yang baik sehingga hasil pertanian dapat dilihat dengan jelas. Partisipasi PUPM dengan masyarakat sangat berperang penting dalam proses pertanian, oleh karna itu seorang petani dapat ikut serta pada kegiatan seperti seminar-seminar penyuluhan pertanian untuk mengetahui tehnik bertani yang baik.
5. Berperan serta dalam kegiatan seminar-seminar penyuluh pertanian, dalam kegiatan ini seorang petani dapat mengetahui proses bertani yang baik untuk keunggulan hasil-hasil pertanian sampai hasil pertanian dipanen.

Dengan demikian petani dengan secara tidak langsung sudah ikut berpartisipasi dalam aktivitas PUPM tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung dilapangan bahwasanya partisipasi petani padi di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa tergolong sangat tinggi karna melihat hasil dari pengolahan data yang diambil dari beberapa responden dan aktivitas kelembagaan ikut serta berpartisipasi dalam hal pertanian.

Adapun hasil partisipasi petani padi berdasarkan kategori respon informan yang termasuk dalam kategori rendah, sedang dan tinggi berdasarkan quisioner dalam bentuk pernyataan responden masyarakat Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa adalah :

Tabel 5.6 Hasil Skoring Responden

NO	PERNYATAAN	JUMLAH	SKORING	KRITERIA
1	Petani sering membeli alat-alat pertanian di toko tani yang ada di Desa Jipang	18	2,12	SEDANG
2	Responden menambah peralatan pertanian, mempunyai lahan dan memanfaatkannya secara langsung untuk mengefisienkan pekerjaan petani	22	2,60	TINGGI
3	Responden menjual kelebihan hasil pangan kepada pengumpul yang dibentuk oleh lembaga PUPM	19	2,12	SEDANG
4	Responden merekrut tenaga kerja untuk membantu dalam mengolah lahan	19	2,12	SEDANG
5	Responden bekerja lebih lama untuk mendapatkan upah yang lebih besar Apabila bekerja sebagai tenaga kerja perkebunan	18	1,92	RENDAH
JUMLAH/RATA-RATA		96	2,17	SEDANG

Sumber: Data Primer setelah diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil skor dari 25 responden pada pernyataan;

1. Ada 18 orang responden yang sering membeli alat-alat pertanian di toko tani yang ada di Desa Jipang dengan total skoring 2,12 sehingga memperoleh kategori sedang.
2. Ada 22 responden yang sering menambah peralatan pertanian, mempunyai lahan dan memanfaatkannya secara langsung untuk mengefisienkan pekerjaan petani dengan skoring 2,60 dan memperoleh kategori tinggi.

3. Ada 19 responden yang sering menjual kelebihan hasil pangan kepada pengumpul yang dibentuk oleh lembaga PUPM dengan total skoring 2,12 dan memperoleh kategori sedang.
4. Ada 19 orang responden yang sering merekrut tenaga kerja untuk membantu dalam mengolah lahan dengan skoring 2,12 dan memperoleh kategori sedang.
5. Ada 18 responden bekerja lebih lama untuk mendapatkan upah yang lebih besar Apabila bekerja sebagai tenaga kerja perkebunan dengan skoring 1,92 memperoleh kategori rendah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil skor responden yang masuk kategori sedang dengan total skoring 2,17. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa tingkat partisipasi petani padi di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa cukup baik, sehingga hasil dari pertanian petani semakin baik dan meningkat, melihat aktivitas petani dalam melakukan hal pertanian secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam kegiatan aktivitas PUPM tersebut.

Tabel 5.7 Hasil Skoring tingkat partisipasi responden petani padi di Desa Jipang.

No	Nama	Skor	Kriteria
1	Muh. Saleh Dg Malu	3	Tinggi
2	H.B. Dg Rowa	3	Tinggi
3	Jamaluddin Dg Kulle	2,80	Tinggi
4	T. Dg Gassing	1,30	Rendah
5	Rasyid Dg Tiro	2,80	Tinggi
6	Minggu Dg Mone	3	Tinggi

7	Gustam Dg Ngasa	1,30	Rendah
8	Jafar Dg Rani	3	Tinggi
9	Rauf Dg Lalang	2,80	Tinggi
10	Syahrul Dg Lurang	2,80	Tinggi
11	Abd Kadir Dg Lalang	3	Tinggi
12	Rahim Dg Mone	1	Rendah
13	Rahman Dg Tarra	3	Tinggi
14	Arif Dg Limpo	3	Tinggi
15	Syahrudin Dg Naba	3	Tinggi
16	Salam Dg Lallo	2,60	Tinggi
17	Agus Dg Gassing	1,20	Rendah
18	Syaiful Dg Ngunjung	2,20	Sedang
19	Tahir	2,80	Tinggi
20	Hakim Dg Nakku	3	Tinggi
21	Paharuddin Dg Sunu	3	Tinggi
22	Nyombo Dg Ngunjung	3	Tinggi
23	Bahtiar Dg Siriwa	2,40	Sedang
24	Malik Dg Lallo	3	Tinggi
25	Parawansah Dg Nyonri	3	Tinggi

Sumber: Data Primer setelah diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa dari 25 responden terdapat 19 responden tingkat partisipasinya tergolong tinggi dengan total skor 55,6. Sedangkan pada kategori sedang dengan perolehan skor 4,6. Dan pada kategori rendah dengan perolehan skor 4,8.

Skor penilaian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tinggi : 2,34 – 3
2. Sedang : 1,67 – 2,33
3. Rendah : 1 – 1,66

Dengan Rumus:

$$Z = \frac{X-Y}{K}$$

Keterangan :

Z = Interval

X = Nilai Tertinggi

Y = Nilai Terendah

K = Banyaknya Kategori

Adapun distribusi frekuensi dan presentasi skor partisipasi petani padi di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8 Distribusi Persentase Skor Responden di Desa Jipang

No	Skor	Kategori	Persentase/ %
1.	1,00 – 1,66	Rendah	16
2.	1,67 – 2,33	Sedang	4
3.	2,34 – 3,00	Tinggi	80
4.	Jumlah		100

Sumber: Data Primer setelah diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 5.8 di atas, diperoleh bahwa dari 25 orang responden di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa terdapat 4 responden yang berada pada kategori rendah dengan presentasi 16 %, 1 orang responden yang berada pada kategori sedang dengan presentase 4 %, 20 orang responden yang berada pada kategori tinggi dengan frekuensi 80 %. dari hasil presentas e partisipasi petani padi di Desa Jipang Kecamatan Botonompo Selatan Kabupaten Gowa sangat tinggi karna dari 25 jumlah responden terdapat 19 responden yang memperoleh skor tinggi dengan frekuensi 80 %.

Skor di kategorikan tinggi berarti responden sering membeli alat-alat pertanian, dan responden juga sering juga menambah alat-alat pertaniannya guna mengefisienkan pekerjaannya, petani padi juga sering menjual kelebihan hasil panennya kepada Lembaga Usaha Pangan (LUPM) yang merupakan lembaga bentukan dari PUPM, responden juga sering merekrut tenaga kerja untuk membantu mebantu mengelolah usaha pertaniannya, dan juga responden sering bekerja lebih lama guna memperoleh upah atau hasil yang lebih banyak.

VI PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan salah satu kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa partisipasi petani pada terhadap PUPM yaitu Menjual kelebihan hasil pangan kepada lembaga usaha pangan masyarakat (LUPM), hasil-hasil pertanian seorang petani dijual kepada lembaga usaha pangan masyarakat yang kemudian dioleh oleh Bulog untuk dijual kembali ketoko tani sebagai bibit dan bahan pangan unggul pertanian, Membeli alat dan bahan-bahan pertanian pada toko tani indonesia(TTI), seorang petani membeli alat dan bahan-bahan pertanian pada lembaga usaha pangan masyarakat untuk dapat mempermudah pekerjaan seorang petani dilahan pertanian, Melakukan pengolahan pada gudang yang telah disediakan oleh PUPM pasca panen, seperti melakukan pengolahan pada jasa penggilingan, pengeringan pada pasca panen, Ikut dalam keanggotaan kelompok tani untuk mengetahui cara bertani yang baik sehingga hasil pertanian dapat dilihat dengan jelas partisipasi PUPM dengan masyarakat sangat berperang penting dalam proses pertanian. Oleh karna itu seorang petani dapat ikut serta pada seminar-seminar penyuluhan pertanian untuk mengetahui tehnik bertani yang baik dan Berperan serta dalam kegiatan seminar-seminar penyuluh pertanian, dalam kegiatan ini seorang petani dapat mengetahui proses bertani yang baik untuk keunggulan hasil-hasil pertanian sampai hasil pertanian dipanen.

Berdasarkan penelitian ini partisipasi petani padi di Desa Jipang Kecamatan Botonompo Selatan Kabupaten Gowa dikategorikan tinggi karena dari 25 jumlah responden terdapat 19 responden yang memperoleh skor tinggi dengan frekuensi 80 %. Skor tinggi berarti responden memenuhi kriteria sebagai seorang petani yang sering membeli alat-alat pertanian ,dan responden juga sering juga menambah alat-alat pertaniannya guna mengefisienkan pekerjaannya, petani padi juga sering menjual kelebihan hasil panennya kepada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) yang merupakan lembaga bentukan dari PUPM, responden juga sering merekrut tenaga kerja untuk membantu mebantu mengelolah usaha pertaniannya, dan juga responden sering bekerja lebih lama guna memperoleh upah atau hasil yang lebih banyak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian langsung dengan responden maka peneliti memberikan saran ataupun masukan untuk sebaiknya kepada :

1. PUPM, sebaiknya sering mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat petani agar ikut berpartisipasi terhadap pengolahan lahan dan kegiatan pertanian agar petani bisa memberi masukan maupun ide-ide dan memberikan pemahaman kepada petani terkait manfaat dan kelebihan dari lembaga bentukan dari kementerian pertanian tersebut dapat mempermudah aktivitas pertanian dimasyarakat.
2. Pemerintah, sebaiknya sebagai seorang pemerintah lebih sering memperhatikan ataupun meninjau langsung aktivitas di lahan pertanian

dimasyarakat untuk melihat kelebihan dan kekurangan pada aktivitas pertanian seperti bantuan penambahan irigasi pertanian untuk mempermudah dan petani mengelola lahan pertanian yang ada dimasyarakat yang efisien.

3. Masyarakat, sebaiknya masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan dari Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI) khususnya di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.



DAFTAR PUSTAKA

- A.T Mosher, (1985). Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Jakarta : CV. Yasaguna.
- Abdul Karim H. Ahmad. 2007. "Media Pembelajaran". Badan Penerbit UNM, Makassar
- Badan Pusat Statistika, 2003. Statistik Pertanian 2003. BPS, Jakarta. Hal, 26
- Branson, RE. dan Douglas G.N., 1983. Introduction to Agricultural Marketing, McGraw-Hill Book Company, New York, USA.
- Davis, Keith. 2000. Perilaku Dalam Organisasi, Edisi ketujuh, Jakarta: Penerbit: Erlangga
- DKS Swastika, PU Hadi, N Ilham - Pusat Penelitian Sosial Ekonom Pertanian, 2000.
- Ellis, A. (1998). Rational emotive behavior therapy and its applications to emotional education. In A. Ellis & S. Blau (Eds.), The Albert Ellis reader: A guide to well-being using rational emotive behavior therapy (pp. 253-260). New Jersey: Citadel Press.
- Elizabeth, R dan Darwis, V. 2003. Karakteristik Petani Miskin dan Persepsinya Terhadap Program JPS di Propinsi Jawa Timur. SOCA. Bali.
- Hawkins dan Van den Ban. 1999. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta
- Iwan. 2010. Analisis Hubungan Karakteristik Petani dengan Partisipasi Petani terhadap Program Pengembangan Agribisnis Jagung Hibrida pada Kabupaten Karanganyar. <http://iwansas.wordpress.com>
- Landasan Teori Mikkelsen dalam Usman (2008)
- Leitch Robert A., K. Roscoe Davis. 2005. Analisis & Desain. Andi. Yogyakarta.
- Pakpahan, A. 1990. Permasalahan dan Landasan Konseptual dalam rekayasa Institusi (Koperasi). Makalah disampaikan sebagai Bahan Seminar pada Pengkajian Masalah Perkoperasian Nasional, Badan penelitian dan Pengembangan Departemen Koperasi di Jakarta, 23 Oktober 1990. PSE-Balitbang Deptan.
- Puspitasari, N., Puspitawati, H., & Herawti, T. (2013). Peran gender, kontribusi ekonomi perempuan, dan kesejahteraan keluarga petani hortikultura. *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, 6(1), 10-19.

- Puspitawati, H, Simanjuntak, M., & Hayati, L. (2012). Kontribusi ekonomi dan peran ganda perempuan serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan subjektif. *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, 5(1), 11-16
- Rona, Santiana. 1999. Hubungan Karakteristik Petani dengan Tingkat Partisipasinya Sebagai Anggota Kelompok Tani. Fakultas Pertanian IPB. Bogor
- Sriyanto, 2010. Pengertian Kemampuan. (online) <http://ian43.wordpress.com/2010/12/23/pengertian-kemampuan/>.
- Suradisastra, K. 2008. Strategi Pemberdayaan Kelambagaan Petani. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Sutanto, R. 2002. Penerapan Pertanian Organik Pemasarakatan dan Pengembangannya. Kanisius. Jakarta. 211 hlm.
- Stepan. 2011. Partisipasi Anggota Kelompok Tani dalam Programa Penyuluhan di Desa Kalampising Lumbis Kabupaten Nunukan. <http://stepanusdel.blogspot.com/2011/04/partisipasia-nggota-kelompok-tani-dalam.html>
- Soekartawi. 1999. Agribisnis Teori dan Aplikasinya. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Siddique, T. (2003). Migration as a livelihood strategy of the poor: the Bangladesh case, Regional Conference on Migration, Development and Pro-Poor Policy Choices in Asia, 22-24 June, 2003, Dhaka, 1-23, www.livelihoods.org.
- Scoones, Ian. 1998. Sustainable Rural Livelihood: A Framework for Analysis. Institute of Development Studies.
- Soekartawi, et al. 1994. Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk pengembangan Petani Kecil. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta
2002. Struktur Penguasaan dan Aspek Penataan Lahan serta Implikasinya terhadap Pembangunan Eknomi Pertanian. *Saptana et al*
2009. Integrasi Kelembagaan P3A dengan Kelompok Tani dan Gapoktan. Rita N. Suhaeti *et al*
- Widodo, S. (2006). Migrasi internasional tenaga kerja pertanian di Kabupaten Bangkalan. *Pamator*, 3(2), 65-78.

LAMPIRAN

- ✓ Lampiran I : Kuisisioner Penelitian
- ✓ Lampiran II : Peta Lokasi Penelitian
- ✓ Lampiran III : Identitas Responden
- ✓ Lampiran IV : Rekapitulasi Data
- ✓ Lampiran V : Dokumentasi Penelitian
- ✓ Lampiran VI : Surat Izin Penelitian



KUISIONER PENELITIAN

**Pengembangan Usaha Petani Padi Pada Aktivitas kelembagaan PUPM di
Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa**

1. Karakteristik responden

- 1. Nama : Jamaluddin Dg Kulle
- 2. Umur : 52 Tahun
- 3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 4. Status : Menikah
- 5. Status Pekerjaan : Bekerja
- 6. Alamat Lengkap : Dusun Jipang Desa Jipang Kecamatan
Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa
- 7. Nomor Telpon : 082347286241

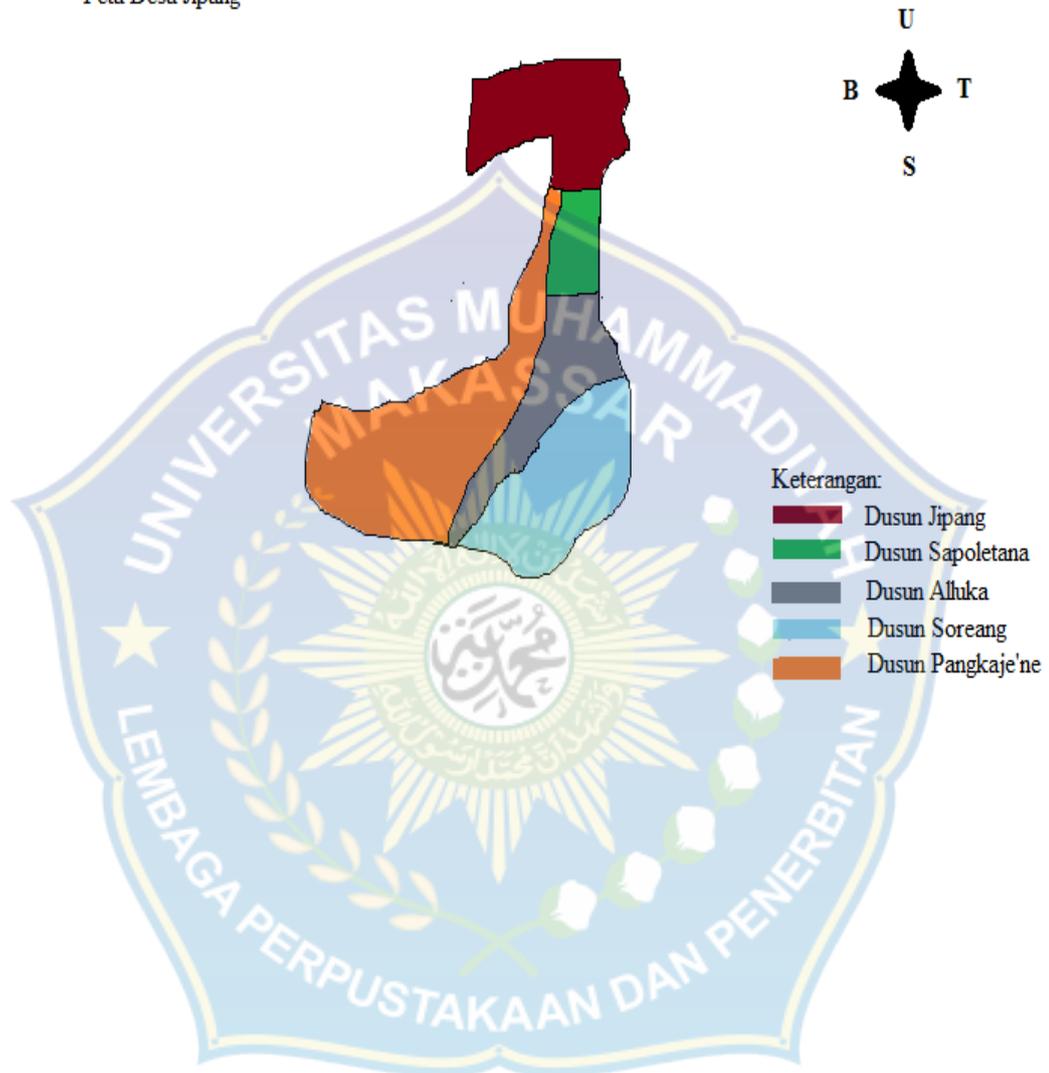
Anggota keluarga	Tingkat Pendidikan							
	Tidak sekolah	SD	SMP	SM U	D3	S1	S2	S3
Ayah				✓				
Istri				✓				
Anak								
- Pertama				✓				
- Kedua				✓				
- Ketiga		✓						
- Keempat								

Pernyataan		Tidak	Kadang-kadang	Ya	Kategori
1	Apakah anda sering membeli alat-alat pertanian di toko tani yang ada di Desa Jipang?			✓	Tinggi
2.	Apabila anda mempunyai lahan dan memanfaatkannya secara langsung, apakah anda menambah peralatan pertanian untuk mengefisienkan pekerjaan Anda?			✓	Tinggi
3.	Apakah anda sering menjual kelebihan hasil pangan kepada pengumpul yang dibentuk oleh lembaga PUPM?			✓	Tinggi
4.	Apakah Anda merekrut tenaga kerja untuk membantu Anda dalam mengolah lahan?		✓		Sedang
5.	Apabila Anda bekerja sebagai tenaga kerja perkebunan, apakah Anda bekerja lebih lama untuk mendapatkan upah yang lebih besar?			✓	Tinggi
Hasil skor			2	12	
Jumlah keseluruhan			14		

Hasil skor dibagi dengan jumlah pertanyaan

Peta Desa Jipang Kecamatan Bontonampo Selatan Kabupaten Gowa

Peta Desa Jipang



Lampiran.3

Identitas Responden

No	Nama Responden	Umur	Pendidikan	Tanggungan keluarga (Orang)	Luas Lahan (ha)
1	Muh. Saleh Dg Malu	58	SMA	2	1
2	H.B. Dg Rowa	76	SD	2	0,78
3	Jamaluddin Dg Kulle	52	SMA	4	2
4	T. Dg Gassing	57	SMA	2	1,5
5	Rasyid Dg Tiro	56	SMP	2	0,50
6	Minggu Dg Mone	45	SMP	3	0,21
7	Gustam Dg Ngasa	51	SMA	3	0,42
8	Jafar Dg Rani	38	SD	5	1,3
9	Rauf Dg Lalang	38	SMA	4	0,70
10	Syahrul Dg Lurang	31	SMA	2	0,50
11	Abd Kadir Dg Lalang	42	SMA	6	0,78
12	Rahim Dg Mone	67	SD	8	0,78
13	Rahman Dg Tarra	38	S1	3	0,60
14	Arif Dg Limpo	50	SD	4	1
15	Syharuddin Dg Naba	40	SMA	3	0,80
16	Salam Dg Lallo	36	S1	4	0,50
17	Agus Dg Gassing	45	SMP	2	0,35
18	Syaiful Dg Ngunjung	30	SMA	4	0,30
19	Tahir	48	SMA	3	0,25

20	Hakim Dg Nakku	36	SD	4	1,2
21	Paharuddin Dg Sunu	40	SMP	5	0,40
22	Nyombo Dg Ngunjung	70	SD	2	0,50
23	Bahtiar Dg Siriwa	57	SMA	4	0,50
24	Malik Dg Lallo	36	SMA	2	0,65
25	Parawansah Dg Nyonri	57	SMA	5	0,60



Rekapitulasi data

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan dan wawancara melalui beberapa responden didapatkan rekapitulasi data petani padi dengan pembahasan Skor ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ada, teknik pemberian skor ada 3 macam antara lain dengan pemberian skor 1 pada nilai yang rendah, pemberian skor 2 pada nilai yang sedang, dan pemberian skor 3 pada nilai yang

Skor penilaian dapat dilihat sebagai berikut:

- 4. Tinggi : 2,34 – 3
- 5. Sedang : 1,67 – 2,33
- 6. Rendah : 1 – 1,66

Dengan Rumus:

$$Z = \frac{X - Y}{K}$$

Keterangan :

Z = Interval

X = Nilai Tertinggi

Y = Nilai Terendah

K = Banyaknya Kategori

Hasil Rekapitulasi Data

$$Z = 50,8$$

$$X = 55,6$$

$$Y = 4,8$$

$$K = 25$$

$$Z = \frac{x-y}{K}$$

$$50,8 = \frac{55,6-4,8}{25} = \frac{50,8}{25} = 2.032$$

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan dan wawancara melalui beberapa responden didapatkan rekapitulasi data petani padi dengan pembahasan adalah **2.032**



Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara Responden Muh Saleh Dg Malu



Gambar 2. Wawancara Responden H.B.Dg Rowa



Gambar 3. Wawancara Responden Rasyid Dg Tiro



Gambar 4. Wawancara Responden T.Dg Gassing



Gambar 5. Wawancara Responden Jamaluddin Dg Kulle



Gambar 6. Foto Kantor Desa Jipang

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Soreang 11 April 1991 dari ayah Bachtiar dan ibu Nurahayati. Penulis merupakan anak terakhir dari delapan bersaudara.

Pendidikan formal yang di lalui penulis adalah SMA NEGERI 1 Takalar dan lulus tahun 2009. Pada tahun 2014 penulis lulus seleksi masuk Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah KKP di Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Penulis juga pernah kerja di industri plywood PT. Kantingan Timber Celebes Makassar sebagai Operator Mesin tahun 2010-2014.

Selain itu penulis juga aktif menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Agribisnis 2014/2015. Tugas akhir dalam pendidikan tinggi diselesaikan dengan menulis skripsi yang berjudul “Partisipasi Petani Padi Pada Aktivitas Kelembagaan PUPM di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

